

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Rembang untuk tahun 2016-2021. Visi tersebut merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur untuk menggambarkan agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator sehingga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawahini:

5.1.1 Masyarakat sejahtera

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, selain itu terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya.

5.1.2 Semangat Kebersamaan

Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan suatu tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa Indonesia). Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis.

Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini mengandung semangat bersama dalam harmoni kerja membangun kabupaten rembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan kebersamaan sikap kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan saling menghargai (toleransi) yang selalu ditumbuhkan. Pembangunan itu mempunyai semangat pembangunan menuju Rembang yang “*madani*”. dalam Falsafah **Rembang Madani** menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan karakter baik dalam kerangka pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga)

5.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. Membangun masyarakat bukan semata mata mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalahan ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik.

5.1.4 Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya dan juga resiko. Disini diperlukan suatu keberanian dalam diri individu untuk melakukan tindakan membangun usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Untuk menjawab pembangunan kewirausahaan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kemajuan. Pembangunan kewirausahaan sebagai motor penggerak untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya, memajukan perekonomian daerah, memenuhi macam macam produk dan adanya jasa.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

5.2. MISI

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
Tunjuan dari misi satu ini adalah mewujudkan Good Governance
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
Tujuan dari misi ke dua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Menurunnya angka pengangguran, Meningkatnya kesejahteraan sosial, Meningkatnya usaha industri rumah tangga keluarga miskin.
Selain itu juga mempunyai tujuan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut dengan sasaran Meningkatnya kualitas air dan udara dan Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Tujuan dari misi ke tiga adalah meningkatkan perekonomian daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut melalui sasaran sebagai berikut : Meningkatnya Investasi daerah, Meningkatnya Kinerja ekonomi kreatif, Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.

Tujuan dari misi ke empat adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatnya kuantitas dan kualitas air baku, Meningkatnya akses layanan dasar, Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.

Tujuan misi ke lima adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatnya kualitas Pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak.

6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.

Tujuan misi ke enam adalah Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, Meningkatnya rasa aman masyarakat.

Selain itu juga untuk Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Tujuan misi ke tujuh adalah Mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah dengan meningkatnya ketahanan pangan

Upaya untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Rembang melalui ketujuh misi, pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Ke tujuh misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang.

Kondisi Kabupaten Rembang yang lebih sejahtera akan dilihat dari kemandirian ekonomi yang meningkat, indeks reformasi birokrasi semakin membaik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.

Kemandirian ekonomi dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Pada saat sekarang ini angka kemiskinan Kabupaten Rembang menunjukkan penurunan secara signifikan yaitu pada tahun 2015 sebesar

19,28% menurun menjadi 15,41% pada tahun 2018. Target penurunan angka kemiskinan tahun 2021 pada kisaran 12,5% - 11,5%. Selain itu, dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,5% meningkat menjadi 6,18% pada tahun 2017. Target yang akan dicapai pada tahun 2021 pada kisaran 5,5% - 6,5%.

Nilai investasi daerah sebesar 3,478 triliun pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 5,722 triliun pada tahun 2017. Target nilai investasi yang akan dicapai pada tahun 2021 sebesar 10 triliun atau pada kisaran pertumbuhan nilai investasi sebesar 6% - 6,5%.

Skor PPH pada tahun 2015 sebesar 85,9% meningkat menjadi sebesar 87,58% pada tahun 2017. Target skor PPH pada tahun 2021 pada kisaran 87% - 88,3%.

Untuk mengukur atau mengklasifikasikan suatu daerah apakah suatu daerah itu maju, berkembang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup maka dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Rembang pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 68,18% meningkat menjadi sebesar 68,95% pada tahun 2017. Sedangkan target capaian IPM pada tahun 2021 pada kisaran 69,8%.

Selain melihat Kemandirian suatu daerah, kabupaten Rembang juga membangun semangat kebersamaan dengan membangun kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama. Semua itu dapat dilihat dari kepekerintahan yang baik, yang diukur dari Indeks reformasi birokrasi suatu daerah, target nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2021 sebesar 78-80 poin dengan kriteria B. Untuk itu keberhasilan yang lain dapat dilihat dari nilai Sakip. Kabupaten Rembang pada tahun 2015 mendapatkan nilai sakip 54 poin dengan kriteria C. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan skor 58,64 poin dengan kriteria CC. Sedangkan target tahun 2021 nilai Sakip pada kisaran 70 – 80 poin dengan kriteria B.

Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan selama ini telah dilakukan secara bersama sama dari berbagai stakeholders baik pemerintah, dunia usaha melalui CSR nya dan personal melalui BAZNAS. Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri.

5.3. Program Unggulan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 yang harus diimplementasikan yaitu :

1. Reformasi birokrasi yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
2. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja melalui metode training unit, bursa tenaga kerja dan pengembangan wirausaha muda.
3. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan secara terpadu

Yang mana program ini penanganannya dimulai dari Regulasi, kelembagaan, pendataan, intervensi kegiatan, kemitraan dan pendampingan.

Regulasi sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan ketentuan yang dilaksanakan semua pihak. Kelembagaan dibentuk untuk memudahkan koordinasi dan penanganan kemiskinan, dalam pengelolaan data, perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaporan.. Kelembagaan ini dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan.

Sedangkan pendataan untuk dibutuhkan untuk mengetahui penduduk yang miskin di kabupaten rembang secara pasti, sehingga intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan. Intervensi kegiatan dilakukan secara spesifik sesuai dengan tingkat kemiskinannya. Tingkat Miskin absolut individu dengan intervensi perlindungan sosial maupun pengurangan beban hidup dan jaminan kesehatan. Sedangkan keluarga miskin absolut intervensinya dengan meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu juga memberikan bantuan keuangan desa sesuai dengan tingkat kemiskinnnya, rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; Pemberian beasiswa anak berprestasi keluarga miskin dari sekolah Dasar sampai jenjang perguruan tinggi, Penumbuhan Bumdes sesuai potensi lokal, baik untuk pengelolaan wisata desa, usaha ekonomi desa.

4. Pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.

Program pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan merupakan upaya yang dicanangkan dalam rangka menghadapi arus globalisasi melalui pembangunan potensi kewilayahan. Potensi unggulan merupakan potensi yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah secara menyeluruh.

Pembangunan perekonomian berbasis potensi unggulan ditempuh melalui peningkatan ekonomi kreatif dan pertumbuhan nilai investasi. Peningkatan ekonomi kreatif dilakukan melalui pemasaran sektor pariwisata, dengan mengembangkan desa eco wisata dan daya tarik wisata serta pengembangan nilai budaya melalui kegiatan kesenian yang diwujudkan melalui penyelenggaraan festival seni dan kebudayaan. Sedangkan pertumbuhan nilai investasi dilakukan dengan meningkatkan iklim investasi melalui perbaikan sistem dan pelayanan ijin yang mudah, murah, cepat melalui mall pelayanan.

5. Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis.

Program pengembangan infrastruktur daerah merupakan upaya terpadu untuk menciptakan kemudahan akses bagi peningkatan perekonomian. Pengembangan infrastruktur daerah dilakukan melalui upaya pemerataan pembangunan. Melalui skala pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, keterjangkauan, serta meminimalisir ketimpangan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Sedangkan, pengembangan kawasan strategis merupakan wujud kesinambungan dari upaya menciptakan pengembangan infrastruktur yang ditempuh melalui pemberian ruang, khususnya bagi pengembangan sektor pariwisata dan kawasan perdesaaan. Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan perdesaan

dikembangkan untuk mendorong kegiatan non-pertanian yang kedepannya diharapkan dapat mendukung diversifikasi pertanian. Kawasan strategis banglor merupakan salah satu pengembangan sektor kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan nilai eksteralitas baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

6. Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku.

Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku merupakan salah satu wujud peningkatan pembangunan infrastruktur. Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku ditempuh melalui pemanenan air hujan. Pemanenan air hujan dilakukan dengan cara menampung dan menyimpan air melalui alternatif berupa waduk, embung ataupun bendungan. Proses memanen air hujan merupakan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan akses terhadap persediaan air yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Disisi lain peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses pengawasan dan akses layanan irigasi.

7. Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas.

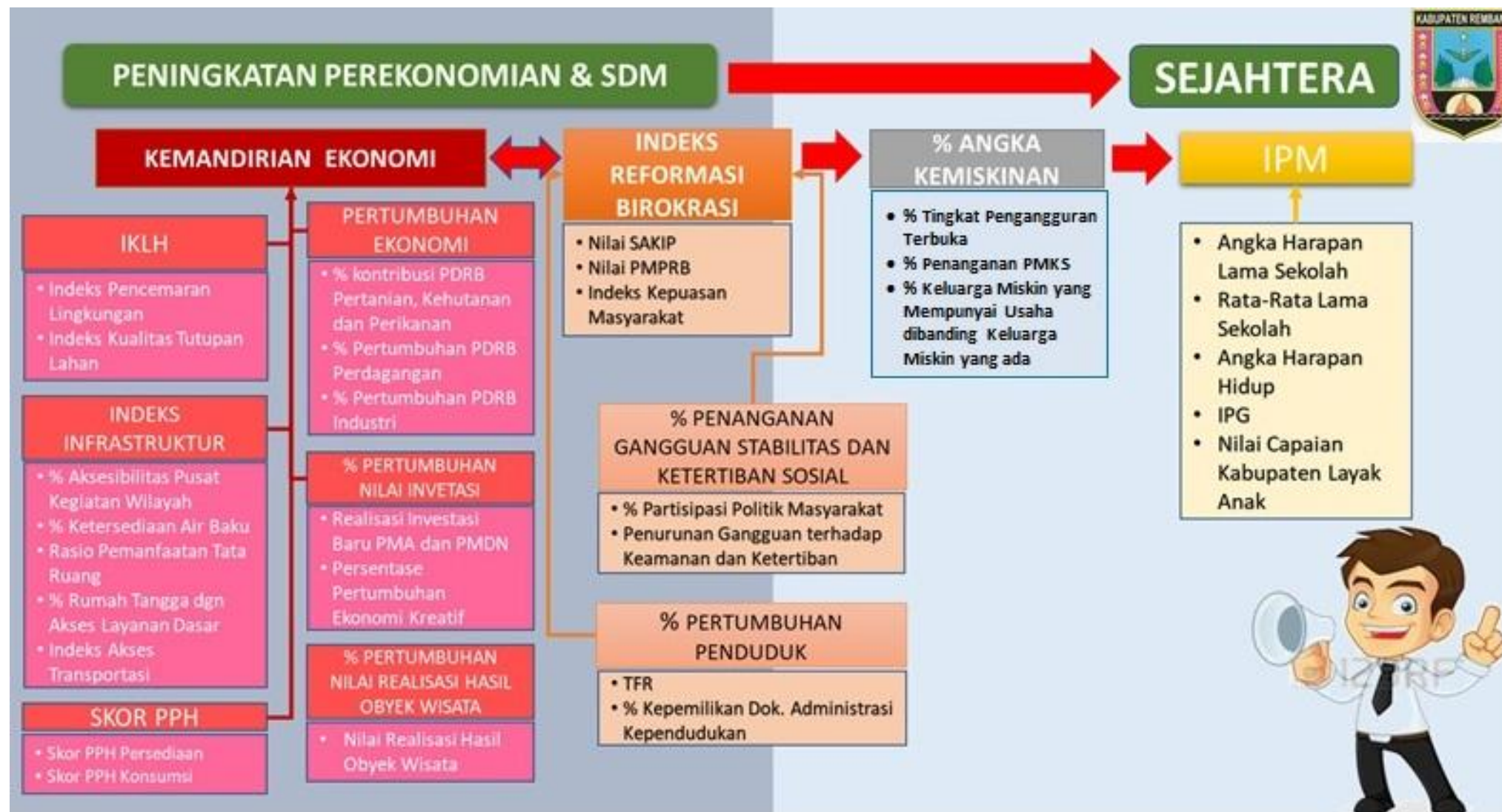
Dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, maka pendidikan merupakan sektor yang tidak dapat dipisahkan. Keterjangkauan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang berkualitas pula. Upaya pengembangan pendidikan di Kabupaten Rembang ditempuh melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemenuhan standar isi, proses dan penilaian keberhasilan, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Disisi lain pengembangan layanan pendidikan berkualitas juga ditempuh melalui pendidikan berbasis keluarga. Pengembangan ini ditempuh melalui keikutsertaan keluarga (khususnya orang tua) untuk ikut aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran siswa di lingkungan keluarga. Disatu sisi melalui Pendidikan berbasis keluarga juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya Pendidikan seksual komprehensif, mengingat jika dibandingkan dengan lingkungan yang lain, lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdekat yang banyak memberikan dampak pada pengembangan Pendidikan.

Pengembangan pelayanan pendidikan berbasis keluarga juga melibatkan peran dari kelompok 'puspaga samara' (pusat pembelajaran keluarga sakinah mawwadah warahmah) untuk mencapai sasaran pendidikan yang berkualitas.

8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.

Program peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan ditempuh melalui peningkatan kesadaran pentingnya kesehatan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta masih banyaknya kasus akibat buruknya pemahaman dan kualitas kesehatan di kalangan masyarakat dan keluarga. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kesehatan, peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kesehatan serta peningkatan keberdayaan gender.



Gambar 5.1 Kerangka Logis Pencapaian Visi

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021
Tahun 2020-2021

Visi:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kinerja			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”														
1	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi			Angka	NA	NA	NA	50-60	60-70	70-80	70-80		
			1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh	1)	Nilai SAKIP	Angka	52	55,04	58,64	50-60	60-70	70-80	70-80
					2)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Angka	62	57	NA	45-50	50-60	60-70	60-70
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3)	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	73,12	76,86	77,81	78,5	78,5-82,25)	82,26-88,30	82,26-88,30	
Misi II : “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”														
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2. Persentase angka kemiskinan			%	18,54	18,35	15,41	14,5	12,18-13,18	11,07-12,07	11,07-12,07		
			3	Menurunnya angka pengangguran	4)	Persentase Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,3	3,19	2,87	2,8	2,7-2,6	2,6-2,5	2,6-2,5
					4	Meningkatnya kesejahteraan sosial	5)	Persentase penanganan PMKS	%	NA	NA	20	25	27

Tujuan		Indikator	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi			Target			Kinerja
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			5	Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin	6)	Persentase keluarga miskin yang mempunyai usaha	%	NA	NA	55	60	65	75	75
		3. Pertumbuhan Ekonomi					%	5,23	6,18	NA	5,5-6,0	5,5-6,0	6,0-6,5	6,0-6,5
			6	Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan	7)	Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	27,75	27,15	NA	23-24	24-25	25-26	25-26
			7	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	8)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,28	6,56	NA	6-6,6	6,63	6,65	6,65
			8	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	9)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	7,86	6,34	NA	6-6,4	6,45	6,5	6,5
3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					Angka	63,65	66	46,61	46,61	58,9	61,26	61,26
			9	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	10)	Indeks pencemaran lingkungan	Angka	36,3	36,3	26,85	26,85	43,26	44,99	44,99
			10	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	11)	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	65	65	69	69	74,63	77.62	77,62

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kinerja			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Misi III : “Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”														
4	Meningkatkan perekonomian daerah	5. Persentase pertumbuhan nilai Investasi				%	48,71	2,09	46,02	3-5	5-7	7-10	7-10	
			11	Meningkatnya Investasi daerah	12	Realisasi investasi baru PMA dan PMDN	Rp	5,17 Triliun	5,28 Triliun	7,71 Triliun	8 Triliun	9 Triliun	10 Triliun	10 Triliun
			12	Meningkatnya Kinerja ekonomi kreatif	13)	Persentase pertumbuhan Industri kreatif	%	na	na	na	na	12,5	13	13
		6. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata				%	7,68	9,76	10,67	3-5	5-10	10-15	10-15	
			13	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	14)	Nilai Realisai hasil obyek wisata	Rp	3,92 milyar	5,84 milyar	6,46 milyar	6 Milyar	7,04 Milyar	7,55 Milyar	7,55 Milyar
Misi IV : Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan														
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	7. Indeks infrastruktur				Angka	59,45	63,39	65,96	67,51	69,26	76,23	76,23	
			14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	15)	Persentase aksesibilitas pusat kegiatan wilayah	%	50	62	67,9	68	70	75	75
			15	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku	16)	Persentase ketersediaan air baku	%	37,46	33,87	30,64	32	35	40	40
			16	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang	17)	Rasio pemanfaatan tata ruang	%	75	80	87	93	80	100	100

Tujuan		Indikator	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi			Target			Kinerja
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			17	Meningkatnya akses layanan dasar	18)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar	%	76,53	81,24	84,83	86	90	93,35	93,35
			18	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	19)	Indeks akses transportasi	Angka	57,48	59,20	60,52	62,04	66,30	76,13	76,13
Misi V : “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”														
6	Meningkatkan kualitas SDM	8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)					Angka	68,60	68,95	69,46	70	70,96	71,18	71,18
			19	Meningkatnya kualitas pendidikan	20)	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,02	12,04	12,05	12,2	12,4	12,6	12,6
					21)	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	6,92	6,97	6,95	7,3	7,7	7,8	7,8
			20	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	22)	Angka Harapan Hidup	Angka	74,27	74,32	74,39	72-73	73-74	74-75	74-75
			21	Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak	23)	IPG	Angka	86,5	86,59	86,49	87,1	87,3	87,5	87,5
					24)	Nilai Capaian kabupaten Layak anak	Angka	650	700	700	700	725-760	760-800	760-800
Misi VI: “Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan”														
7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban	9. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial					%	NA	NA	NA	40-50	50-60	60-70	60-70
			22	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	25)	Persentase Partisipasi politik masyarakat	%	NA	73,3	NA	74	74	74	74

Tujuan		Indikator	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi			Target			Kinerja
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat		23	Meningkatnya rasa aman masyarakat	26)	Persentase Penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	%	NA	NA	20	20	15	10	10
8	Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	10. Persentase pertumbuhan penduduk					%	0,81	0,81	NA	0,8	0,79	0,78	0,78
			24	Menurunnya pertumbuhan penduduk	27)	TFR	Angka	2,07	2,07	NA	2,05	1,97-2,00	2,00-2,03	2,00-2,03
			25	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	28)	Persetase efektifitas penyelesaian layanan administrasi dukcapil	%	NA	NA	NA	97-98	98-99	99-100	99-100
Misi VII: “Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan”														
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	11. Skor PPH					Skor	85,4	87,58	86,8	85	86-87	87-88,3	87-88,3
			26	Meningkatnya ketahanan pangan	29)	Skor PPH Ketersediaan	Skor	86,93	87,43	87,93	88	88,93	89,43	89,43
					30)	Skor PPH Konsumsi	Skor	87,8	88,3	85,4	86	86,8	87,3	87,3

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran di pisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya, sasaran secara spesifik terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja “*impact*” yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati Rembang pada tahun 2021. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Rembang.

Tabel 5.2
Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU Kabupaten)		Tujuan OPD		Indikator Perangkat Daerah	OPD	
Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”							
1.	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi					
			1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1)	Nilai SAKIP	Setda (Bag. Organisasi)
					2)	Nilai PMPRB meliputi :	
						a. Indeks kualitas perencanaan	BAPPEDA
						b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD
						c. Nilai Maturitas SPIP	Inspektorat
d. Nilai kualitas ASN	BKD						
	2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3)	Indeks kepuasan masyarakat	Semua OPD (Koordinator : Bag. Organisasi)		
Misi II : “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”							
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2. Persentase angka kemiskinan					
			3	Menurunkan angka pengangguran	4)	Persentase Pertumbuhan Partisipasi angkatan kerja	DPMPTSP Naker
			4	Meningkatkan kesejahteraan sosial	5)	Persentase PMKS yang tertangani	DINSOSPPKB
			5	Meningkatkan usaha industri rumahan keluarga miskin	6)	Persentase Industri Rumahan Perempuan yg mandiri	
					7)	Pertumbuhan kelas kelompok tani	Dintanpan
					8)	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinlutkan
			9)	Persentase Partisipasi angkatan kerja	DPMPTSP Naker		

Tujuan		Indikator Tujuan (IKU Kabupaten)	Tujuan OPD		Indikator Perangkat Daerah		OPD
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3. Pertumbuhan Ekonomi					
			6	Meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan	10)	Persentase peningkatan produksitanaman pertanian	Dintanpan
			7	Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan	11)	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Dinlutkan
					12)	Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Dinperindagkop UKM
8	Meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri	13)	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan				
3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					
			9	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	14)	Indeks kualitas air	DLH
					15)	Indek kualitas udara	
		10	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	16)	Luas tutupan hutan		
Misi III : “Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”							
4	Meningkatkan perekonomian daerah	5. Persentase pertumbuhan nilai Investasi					
			11	Meningkatkan Investasi daerah	17)	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang terserap pada Penanaman Modal	DPMPTSP Naker
			12	Meningkatkan Kinerja Industri kreatif	18)	PersentasePeningkatan klaster usaha Industri Kreatif	Dinindagkop UKM
		6. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata					
			13	Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	19)	Persentase destinasi wisata yang menumbuhkan perekonomian lokal	Dinbudpar
					20)	Persentase budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	
Misi IV : Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan							
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	7. Indeks infrastruktur					
			14	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	21)	Persentase pertumbuhan kemantapan jalan	DPU Taru

Tujuan		Indikator Tujuan (IKU Kabupaten)		Tujuan OPD		Indikator Perangkat Daerah	OPD
daerah					22)	Persentase pertumbuhan Jembatan dalam kondisi baik	
			15	Meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku	23)	Pertumbuhan bangunan air/irigasi kewenangan Kabupatendalam kondisi baik	
			16	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	24)	Pertumbuhan Rasio kesesuaian tata ruang	
			17	Meningkatkan akses layanan dasar	25)	Persentase perkembangan akses sanitasi layak	DPKP
					26)	Persentase perkembangan akses air minum layak	
					27)	Persentase perkembangan pengurangan kawasan permukiman kumuh	
					28)	Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni	
			18	Meningkatkan keselamatan berlalu lintas	29)	Indeks Peningkatan Pengembangan dan keselamatan perhubungan	Dinhub
					30)	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	
Misi V : “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”							
6	Meningkatkan kualitas SDM	8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	19	Meningkatkan kualitas pendidikan	31)	Angka Partisipasi Sekolah pada Seluruh Kelompok Usia Sekolah	Dindikpora
					32)	Level Standar Nasional Pendidikan	
			20	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	33)	AKI	Dinkes
					34)	AKB	
					35)	AKABA	
			21	Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	36)	Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOSPPKB
					37)	Persentase Desa Ramah Anak	

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU Kabupaten)		Tujuan OPD		Indikator Perangkat Daerah	OPD	
Misi VI: “Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan”							
7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	9. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial					
			22	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	38)	Persentase Pertumbuhan Partisipasi Politik Masyarakat	Kesbangpol
			23	Meningkatkan rasa aman masyarakat	39)	PersentaseKesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
					40)	PersentasePenanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	
8	Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	10. Persentase pertumbuhan penduduk					
			24	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	41)	CPR	DINSOSPPKB
			25	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	42)	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
Misi VII: “Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan”							
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	11. Skor PPH					
			26	Meningkatkan ketahanan pangan	43)	Pertumbuhan Skor PPH	Dintanpan
				44)	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan	Dinlutkan	